



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan II
Universitas Jember
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Universitas Jember selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60	%	28	31.46
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30	%	15	3.51
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20	%	10	56.34
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20	%	10	32.65
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.5	Rasio	0.3	1.96
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.6	Rasio	0.4	1.19
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40	%	25	55.94
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5	%	3	17.14



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85	Nilai	0	0
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	%	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress/Kegiatan

Capaian IKU 1 pada TW-2 = 28,40 persen, dengan rincian Jumlah Lulusan 7815 Jumlah responden = 6070 Persentase responden = 78,98% , jumlah alumni yang bekerja 2295 orang; jumlah alumni yang berwirausaha 319 orang dan jumlah alumni yang studi lanjut 736 orang.

Kendala/Permasalahan

1. Tidak semua alumni mengisi link tracer study;
2. Beberapa unit kerja masih menggunakan teknik mobilisasi dalam pengisian link tracer study;
3. Surveyor Tracer Study belum bisa bekerja secara optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memantau kinerja surveyor melalui evaluasi kinerja surveyor tracer study agar upaya dalam mengontak alumni maksimal;
2. Menghimbau beberapa unit kerja yang melakukan teknik mobilisasi pengisian tracer study menjelang yudisium/wisuda, untuk melakukan tracer ulang untuk mengisi link tracer study ulang dengan mengisikan perubahan datanya;
3. Evaluasi kinerja surveyor tracer study pada Triwulan 2;
4. Menghimbau pimpinan fakultas untuk mengikutsertakan peran dosen pembimbing skripsi dalam mengontak alumni yang menjadi bimbingannya.

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Jumlah mahasiswa aktif UNEJ adalah seluruh mahasiswa jenjang D3, D4, S1 semester 5 keatas yang berstatus aktif pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 per tanggal 30 Juni 2025 pukul 10.00 WIB adalah 13.994 Mahasiswa.

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM hingga akhir Juni atau semester Genap 2024/2025 adalah sejumlah 1.917 mahasiswa diluar rumpun kesehatan (FK, FKG, Farmasi dan Keperawatan yg telah dikonversi menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks diluar kampus, dengan rincian sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Variabel a

1. Magang MSIB = 21 Mahasiswa
 2. Magang Mandiri = 888 Mahasiswa
 3. Asistensi Mengajar (Mandiri) = 581 Mahasiswa
 4. Kampus Mengajar = 0 Mahasiswa
 5. Studi Independen MSIB = 1 Mahasiswa
 6. Studi Independen Mandiri = 0 Mahasiswa
 7. Pertukaran Mahasiswa (Mandiri) = 0 Mahasiswa
 8. KKN Tematik = 50 Mahasiswa
 9. Riset Kementerian = 0 Mahasiswa
 10. Riset (Mandiri) = 52 Mahasiswa
 11. Monitoring outbound internal = 323 Mahasiswa
- Total Mahasiswa = 1.917 Mahasiswa.

Variabel b

Mahasiswa Berprestasi Minat dan Bakat

- Kompetisi tingkat Internasional = 31
Kompetisi tingkat Nasional = 193
Kompetisi tingkat Provinsi = 13
Sertifikasi Kompetensi Internasional = 16.06
Karya Mahasiswa = 43
Jumlah = 253

Kendala/Permasalahan

I. Program Kementerian :

1. Jumlah pendaftar program Kementerian yang lolos seleksi sedikit;
2. Konversi tidak maksimal karena waktu pelaksanaan pembelajaran diluar program studi belum selesai sesuai jadwal entri nilai reguler;
3. Kurangnya pendampingan DPL;
4. Tim MBKM fakultas kurang memahami alur/SOP pembelajaran diluar program studi;
5. Mahasiswa terus mengulang kegiatan MBKM (lebih dari 2x) sehingga tidak dapat dikonversi dan tidak diakui di PDDikti.

II. Program Mandiri :

1. Tidak ada laporan terkait pelaksanaan Program Mandiri sehingga tidak terpantau siapa saja yang telah mendaftar Program Mandiri tetapi belum mengisi outbound dan konversi;
2. Kurang Memahami SOP (misal PKS telah kadaluarsa).

Strategi/Tindak Lanjut

1. Meningkatkan jumlah peserta program Mandiri dan Kementerian;
2. Meningkatkan Kegiatan program outbound internal atau di dalam kampus (Lintas Fakultas);
3. Melakukan sosialisasi kembali kepada tim MBKM Fakultas;
4. Memberikan penghargaan/reward kepada prodi/fakultas yang mencapai prosentase tertentu dari total mahasiswanya.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

studi

Progress/Kegiatan

Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah dosen berpraktisi = 377
2. Jumlah dosen bertridarma = 806
3. Jumlah dosen membimbing mahasiswa = 346
4. Jumlah dosen dengan NIDN = 1357

Kendala/Permasalahan

Beberapa dosen baru yang belum ada kegiatan tridarma.

Strategi/Tindak Lanjut

Perhatian khusus untuk dosen baru.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress/Kegiatan

Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri 671; atau persentase pengejar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri 101, Jumlah dosen dengan NIDN sebanyak 1357.

Kendala/Permasalahan

1. Lemahnya pencatatan dosen praktisi mengajar / dosen luar biasa yang diadakan secara mandiri oleh fakultas;
2. Anggaran sertifikasi kompetensi terbatas;
3. Tidak semua dosen mengunggah sertifikat kompetensi dan kegiatan praktisi di sister bkd;
4. Data yang diinput di sister bkd tidak lengkap.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu dibuatkan aplikasi atau sosialisasi kepada fakultas.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Jumlah luaran dosen dan tenaga kependidikan yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional pada TW 2 tahun 2025 ini yaitu sebagai berikut:

1. Luaran Scopus = 289
2. Luaran WoS = 14
3. Luaran Garuda = 286
4. Luaran Google Scholar = 993
5. Luaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) = 144
6. Buku = 134
7. Penelitian = 622
8. Pengabdian = 171
9. Jumlah dosen dengan NIDN = 1357

Kendala/Permasalahan

Adanya kebijakan efisiensi yang menyebabkan tidak bisa terselenggaranya pelatihan/workshops, serta FGD dalam, menunjang pencapaian target target besar universitas.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan kegiatan dengan metode online/hybrid dan cara cara lainnya yang memungkinkan.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Progress/Kegiatan

Merupakan implementasi kerja sama yang dilakukan oleh program studi, baik dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama maupun Implementation Arrangement. Dari 70 program studi yang ada, terdapat 83 kegiatan kerja sama yang dilaksanakan pada TW II (periode April - Juni 2025). Implementasi kerja sama masih masih didominasi pada kegiatan magang mahasiswa.

Kendala/Permasalahan

1. Implementasi kegiatan kerja sama masih didominasi pada pelaksanaan magang mahasiswa, masih perlu peningkatan atau perluasan bidang kerja sama; Tridharma lainnya;
2. Masih belum optimalnya kerja sama luar negeri terutama dengan Perguruan Tinggi QS 200.

Strategi/Tindak Lanjut

Mendorong program studi untuk memperluas mitra kerja sama, dan optimalisasi jenis kegiatan dalam implementasi kerja samanya.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Progress/Kegiatan

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot berdasarkan data yang ada di SIAKAD sebanyak 55,94%. Hasil validasi RPS oleh pusat pengembangan dan inovasi pembelajaran menunjukkan dari 2839 matakuliah yang valid sebanyak 1588 atau setara dengan 56%.

Kendala/Permasalahan

Hasil validasi RPS menunjukkan adanya ketidakselarasan pada CPL-CPMK-Sub CPMK-Metode Pembelajaran-Teknik Penilaian.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pendampingan penyusunan RPS dengan menekankan pada keselarasan CPL-CPMK-Sub CPMK-Metode Pembelajaran-Teknik Penilaian;
2. Materi penyusunan perangkat pembelajaran pada AA dan PEKERTI harus diselenggarakan secara luring untuk meningkatkan kualitas perangkat pembelajaran yang disusun dosen.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress/Kegiatan

Saat ini Prodi S1 yang telah mendapatkan akreditasi internasional sebanyak 12 prodi. Sesuai rumus IKU, perhitungan capaian IKU 8 menggunakan rumus= $n/tx100$

n=Jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t= jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali)

Jumlah prodi D-3=8 prodi

Jumlah prodi D-4= 3 prodi

Jumlah prodi S1= 59 prodi

Total prodi S1, D3 dan D4=70

IKU 8= $12/70=17,14\%$

Pada triwulan 1 telah dilaksanakan Asesmen Lapangan akreditasi internasional ASIIN pada tanggal 13-14 Februari 2025 dan hasilnya akan diumumkan pada bulan Juli 2025.

Pada tanggal 6-8 Agustus 2025 4 prodi soshum akan di-site visit oleh lembaga akreditasi internasional FIBAA dan saat ini sudah pada tahapan SIMULASI 1

Kendala/Permasalahan

1. Prodi yang terlibat dalam FIBAA berbeda strata;
2. Pada tahun 2028 akreditasi internasional 3 prodi sudah habis;
3. Keraguan terhadap pengakuan lembaga akreditasi internasional;
4. Belum ada prodi teknik yang memiliki akreditasi internasional.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Melakukan koordinasi dan simulasi FIBAA secara optimal;
2. Koordinasi dengan pimpinan dan prodi;
3. Memastikan bahwa lembaga akreditasi yang dituju masih diakui oleh pemerintah;
4. Melakukan pendampingan pada prodi teknik untuk submit ke IABEE.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri **[IKU 4.1] Predikat SAKIP**

Progress/Kegiatan

Penjelasan Kegiatan yang Telah Dilakukan :

1. Penggunaan Aplikasi Terintegrasi: Berbagai aplikasi seperti SISTER (Sistem Informasi Terintegrasi) digunakan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas tata kelola non-akademik dalam sistem pengendalian dan pengawasan internal. Semua aplikasi pendukung dapat diakses oleh semua pihak sesuai tugas dan kewenangannya, memungkinkan pimpinan melakukan monitoring langsung.
2. Penyusunan dan Reviu Laporan Kinerja: Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) melakukan verifikasi dan validasi data kinerja, mengkompilasi menjadi konsep LAKIN Universitas, dan diserahkan kepada Tim Reviu di Satuan Pengawasan Internal (SPI). LAKIN yang telah direviu kemudian disahkan oleh Rektor dan dikirimkan kepada Sekretariat Jenderal melalui aplikasi spasikita.kemdikbud.go.id.

Kendala/Permasalahan

Analisis Kendala dan Dampak

1. Serangan Ransomware: Serangan ransomware berdampak pada hilangnya data-data yang telah diunggah di aplikasi LKE.
Dampak: Mengancam integritas dan ketersediaan data kinerja yang sangat krusial untuk pelaporan SAKIP dan akuntabilitas.
2. Persepsi Penilaian dalam Indikator SAKIP: Adanya perbedaan persepsi penilaian dalam indikator SAKIP.
Dampak: Berpotensi menyebabkan inkonsistensi atau bias dalam evaluasi kinerja, yang dapat mempengaruhi predikat SAKIP secara objektif.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi Perbaikan

1. Penguatan Tata Kelola Berbasis Sistem Informasi:
Peningkatan Pendampingan Internal: Melakukan penguatan pendampingan internal untuk unit kerja baik oleh Satuan Pengendalian Internal (SPI) maupun Tim Implementasi SAKIP Universitas.
Penguatan Implementasi Sistem Informasi: Mengembangkan dan memutakhirkan aplikasi untuk mendukung tata kelola yang efisien dan efektif, termasuk perbaikan sistem informasi yang rentan terhadap serangan siber. Hal ini sejalan dengan fokus pada "Pembangunan/pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan Aplikasi SPBE" dalam Kebijakan Anggaran 2026.
Kompilasi Data Tahunan: Pada setiap tahun anggaran baru, Tim Implementasi SAKIP memulai pengumpulan data yang diperlukan untuk evaluasi AKIP Mandiri.
2. Peningkatan Budaya Kinerja dan Akuntabilitas:
Sosialisasi ZI WBK/WBBM: Melakukan sosialisasi pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melibatkan Tim Kerja ZI Fakultas Hukum sebagai unit kerja perintis.
Penguatan Pemahaman ZI: Mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan workshop, sosialisasi terus-menerus melalui media sosial, apel pagi, serta penciptaan role model untuk



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

penguatan pemahaman ZI di lingkungan UNEJ.

Partisipasi Event Publik: UNEJ akan semakin aktif berpartisipasi dalam event percontohan publik / event Kemenpan RB agar lebih dikenal publik secara luas.

3. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pengawasan:

Revisi Anggaran dan Halaman III DIPA: Melakukan revisi anggaran dan revisi halaman III DIPA.

Simulasi Perhitungan Capaian: Membuat simulasi perhitungan capaian EKA (Efektivitas Kinerja Anggaran), IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran), dan NKA (Nilai Kinerja Anggaran) untuk memperkirakan pencapaian NKA.

Peningkatan Kualitas Perencanaan: Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal.

Pemantauan Program dan Anggaran: Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran secara berkala.

Pelaksanaan Anggaran Berbasis Output: Melaksanakan pencapaian pelaksanaan program dan anggaran berbasis capaian output untuk efisiensi optimal.

Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi: Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri **[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L**

Progress/Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi:

- Peningkatan Kinerja Anggaran: UNEJ telah menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam NKA pada tahun 2024, mencapai 118%, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.
- Koordinasi Rutin Penganggaran: Dilakukan koordinasi secara rutin antara bagian Perencanaan Program dan Anggaran (PPA), Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran (EPPA), Tim Pengadaan, dan Bagian Keuangan dalam pencapaian target NKA.
- Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): Rapat bersama pimpinan Wakil Rektor II diadakan dalam upaya pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bersama seluruh elemen tim pengadaan.
- Pendampingan Unit Kerja: Dilakukan pendampingan kepada unit kerja dalam penyusunan revisi dan serapan anggaran.
- Monitoring Anggaran Terintegrasi: Pelaksanaan anggaran belanja modal dan kegiatan dimonitoring melalui integrasi data pada aplikasi Simkeu, Sibaja, Omspan, dan Molk.
- Penyesuaian DIPA: Halaman 3 DIPA disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan setiap triwulan.
- Inovasi Penyusunan RBA: Dilakukan inovasi dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dengan memasukkan manajemen risiko pada aspek anggaran, sehingga perencanaan penggunaan anggaran dengan realisasinya semakin baik.
- Pengelolaan Tata Kelola dan Transparansi: UNEJ berhasil mempertahankan dan meningkatkan predikat SAKIP, menunjukkan pengelolaan tata kelola dan transparansi yang baik, yang berkontribusi pada NKA.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala dan dampaknya dalam pencapaian IKU 10 adalah:

- Pelaksanaan Kegiatan Menumpuk di Akhir Tahun: Pelaksanaan program kegiatan tidak merata sepanjang tahun, dengan banyak kegiatan menumpuk pada akhir tahun.
Dampak: Menghambat efisiensi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang optimal



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

sepanjang tahun.

- Kesadaran Update Data Rendah: Minimnya kesadaran operator untuk memperbarui data terkait paket pengadaan, baik yang masih dalam proses pelaksanaan maupun paket yang telah selesai.
Dampak: Menyebabkan ketidakakuratan data pengadaan dan menyulitkan pemantauan real-time kinerja anggaran.
- Penyusunan Anggaran yang Bersifat Umum: Penyusunan anggaran yang bersifat umum, menyebabkan over fleksibilitas dalam penyerapan anggaran yang berakibat adanya pagu minus untuk beberapa program/kegiatan.
Dampak: Memerlukan revisi anggaran berulang kali, yang menghabiskan waktu dan sumber daya.
- Implementasi Aturan Baru (RO berbasis SBK): Nilai NKA menurun disebabkan oleh implementasi aturan baru terkait rincian output (RO) berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) dan eselon I Dikti belum menerapkan SBK.
Dampak: Menunjukkan tantangan adaptasi terhadap regulasi baru yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran jangka pendek.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Anggaran:
Perbaikan Perencanaan: Melakukan perbaikan perencanaan dengan mereviu DIPA secara periodik, mengendalikan dan mengoptimalkan revisi anggaran, serta mempersiapkan alokasi anggaran untuk pekerjaan lanjutan atau tunggakan.
Pembuatan Simulasi NKA: Membuat simulasi perhitungan capaian Efektivitas Kinerja Anggaran (EKA), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan NKA untuk memperkirakan pencapaian NKA pada tahun berjalan.
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Eksekusi: Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal.
Optimalisasi Update Data: Penambahan fitur baru pada aplikasi Sibaja berupa pemberian advice untuk operator pengadaan agar operator dan staf PPK segera melakukan update data.
2. Percepatan Pelaksanaan Program dan Pengadaan Barang/Jasa:
Proporsionalitas Penyerapan Anggaran: Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.
Percepatan Pelaksanaan PBJ: Menetapkan Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan segera setelah DIPA disahkan, mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan proses PBJ, dan mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran.
Penyelesaian Kegiatan TW I: Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya di bawah Rp200 juta diselesaikan pada Triwulan I.
Pelaksanaan Pembayaran Tepat Waktu: Melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai secara tepat waktu.
3. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja:
Pembatasan Belanja Operasional: Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas, dan konsinyering serta honor tim.
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi: Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.
Fokus pada Output dan Outcome: Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan.
4. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Internal:
Pemantauan Pelaksanaan Program dan Anggaran: Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran secara berkala.
Peningkatan Peran APIP: Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Penjelasan Kegiatan yang Telah Dilakukan :

- Pembangunan Zona Integritas (ZI): ZI merupakan instrumen penting dalam Reformasi Birokrasi yang mengarahkan institusi publik untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. ZI dirancang untuk mencegah segala bentuk korupsi melalui pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- Sosialisasi dan Edukasi Intensif: Dilakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif mengenai pentingnya zona integritas pada semua unit kerja.
- Komitmen Pimpinan Unit Kerja: Komitmen dari pimpinan unit kerja untuk mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas diwujudkan melalui pakta integritas.
- Alokasi Sumber Daya: Dilakukan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung pembangunan zona integritas.
- Penguatan Pengawasan Internal: Penguatan pengawasan dilakukan melalui pembentukan Whistle Blowing System (WBS) sebagai mekanisme penyampaian pengaduan internal terkait dugaan penyalahgunaan di unit kerja.
- Optimalisasi Website SPI: Dilakukan optimalisasi website Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk transparansi dan akuntabilitas kegiatan SPI, termasuk penyediaan menu layanan konsultasi.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala dan dampaknya dalam pencapaian IKU 11 adalah :

- Prioritas Fakultas yang Berbeda: Beberapa Fakultas masih lebih memusatkan perhatian pada usaha meningkatkan penyelenggaraan Tridharma daripada pembangunan ZI.
Dampak: Memperlambat adopsi dan implementasi ZI di seluruh fakultas secara merata, karena fokus sumber daya dan perhatian dialihkan ke kegiatan akademik inti.
- Pemahaman Pembangunan ZI yang belum merata: Pemahaman mengenai pembangunan ZI WBK/WBBM di tingkat internal fakultas masih belum merata.
Dampak: Menghambat pelaksanaan ZI yang konsisten dan efektif di tingkat operasional, karena kurangnya kesamaan persepsi dan pengetahuan.
- Perubahan Budaya Kerja yang Kompleks: Perubahan budaya kerja adalah proses kompleks yang memerlukan waktu cukup lama untuk diterima dan diadopsi oleh seluruh fakultas.
Dampak: Implementasi ZI membutuhkan perubahan mendalam pada kebiasaan kerja dan mentalitas, yang sulit dicapai dalam waktu singkat, sehingga memperlambat progres pembangunan ZI.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi Perbaikan :

- Penguatan Komitmen dan Pemahaman Zona Integritas:
Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan: Melakukan sosialisasi pembangunan ZI WBK/WBBM secara terus-menerus yang melibatkan Tim Kerja ZI Fakultas Hukum sebagai unit kerja perintis sejak tahun 2021.
Penguatan Pemahaman: Menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan workshop, serta sosialisasi melalui media sosial dan apel pagi untuk penguatan pemahaman mengenai pembangunan ZI di lingkungan UNEJ.
Penciptaan Role Model: Mendorong penciptaan role model untuk menginspirasi fakultas lain dalam membangun ZI.
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas:
Peningkatan Monitoring dan Evaluasi: Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI di Fakultas dan Pascasarjana secara berkala, termasuk progres pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) di Fakultas.
Transformasi Menuju PTN-BH: Mempercepat transformasi dari PTN-BLU menjadi PTN-BH yang berkeadilan, karena status PTN-BH diharapkan meningkatkan otonomi dan akuntabilitas kelembagaan secara keseluruhan.
Pengembangan Aplikasi untuk Tata Kelola: Mengembangkan dan memutakhirkan aplikasi untuk



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

mendukung tata kelola yang efisien dan efektif, yang juga akan menunjang transparansi ZI.

- Optimalisasi Sumber Daya dan Keterlibatan para pihak

Alokasi Sumber Daya Memadai: Memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung pembangunan zona integritas.

Membangun Budaya Mutu: Mengoptimalkan penerapan budaya mutu akademik dan non-akademik di seluruh unit kerja.

Keterlibatan Pihak Eksternal: Mengoptimalkan website SPI sebagai media layanan konsultasi, termasuk forum interaktif, untuk meningkatkan partisipasi dan laporan dari semua pihak pemangku kepentingan.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7729.BEI.001] PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional BOPTN	Lembaga	0	0	Rp32.929.430.000	Rp27.648.658.048	83.96
2	[DK.7729.BEI.002] PT Penerima Bantuan Pembelajaran BOPTN	Lembaga	0	0	Rp3.400.000.000	Rp1.233.746.768	36.29
3	[DK.7729.BEI.004] PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran BOPTN	Lembaga	0	0	Rp31.490.570.000	Rp14.492.702.092	46.02
4	[DK.7730.BEI.002] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	0	0	Rp5.479.480.000	Rp1.048.120.300	19.13
5	[DK.7730.CAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran PNBPN BLU	Paket	8	13	Rp8.889.830.000	Rp1.627.022.747	18.30
6	[DK.7730.CAA.002] Sarana Pendukung Perkantoran PNBPN BLU	Paket	6	19	Rp11.500.000.000	Rp5.332.700.923	46.37
7	[DK.7730.CBJ.001] Prasarana Pendukung Pembelajaran PNBPN BLU	unit	0	0	Rp27.120.000.000	Rp3.943.544.764	14.54
8	[DK.7730.DBA.001] Layanan Pendidikan PNBPN BLU	Orang	29800	40000	Rp216.634.050.000	Rp149.613.943.729	69.06



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
9	[DK.7730.DBA.003] Dukungan Operasional Pembelajaran PNB BLU	Orang	948	948	Rp54.581.076.000	Rp36.177.107.805	66.28
10	[DK.7730.DBA.004] Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNB BLU	Orang	1302	1982	Rp51.213.394.000	Rp26.327.851.448	51.41
11	[WA.7734.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
12	[WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp245.875.091.000	Rp202.713.324.219	82.45
Total Anggaran					Rp689.122.921.000	Rp470.158.722.843	68.23

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Pimpinan Fakultas/Prodi diwajibkan untuk mengikutsertakan dosen pembimbing skripsi dalam upaya kontak alumni guna pengisian *tracer study* dan mengarahkan *tracer* ulang bagi alumni yang mengisi secara mobilisasi;
2. Unit Kerja terkait diminta melaksanakan kegiatan pengembangan luaran dosen (pelatihan/FGD) dengan metode *online/hybrid* sebagai solusi atas kebijakan efisiensi anggaran.
3. LPMPP dan Pimpinan Fakultas menyelenggarakan pendampingan penyusunan RPS secara luring untuk menjamin keselarasan CPL-CPMK-Metode Pembelajaran-Teknik Penilaian, serta memastikan pendampingan prodi teknik untuk *submit* IABEE.
4. Pimpinan Unit Tata Kelola Anggaran dan seluruh Unit Pelaksana diinstruksikan memastikan penyerapan anggaran berjalan proporsional setiap bulan, bukan menumpuk di akhir tahun, dan mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
5. Seluruh Pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk meningkatkan penguatan pendampingan internal oleh SPI dan Tim SAKIP, serta segera melakukan simulasi perhitungan Efektivitas Kinerja Anggaran (EKA), IKPA, dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA).
6. Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana diminta meningkatkan sosialisasi ZI-WBK/WBBM secara berkelanjutan dan mempercepat *monitoring* dan evaluasi pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI.

Jember, 5 November 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Rektor
 Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM.,
 ASEAN Eng.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE